

FORMULIR

1770

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS;
- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU
- DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.

TAHUN PAJAK

20

BL

TH

BL

TH

PEMBUKUAN

PENCATATAN

SPT PEMBETULAN KE -

PERHATIAN

- SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

KLU :

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

/

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

:

KK

HB

PH

MT

NPWP ISTERI/SUAMI

:

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

A. PENGHASILAN NETO

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]

5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5- 6)

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

8. KOMPENSASI KERUGIAN

9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K / I /

11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
[Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf i]

13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)

D. KREDIT PAJAK

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)

E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

19. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS tgl bln thn
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. DIRESTITUSIKAN c. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN :
a. 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16
b. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
c. PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)
b. SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
c. NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA
d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
e. BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI
f. FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (.....LEMBAR)
g. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
h. PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS PERPAJAKAN PH ATAU MT
i. DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
j. DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA
l.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL:

NAMA LENGKAP :

NPWP :

TANDA TANGAN

F.1.1.32.16

FORMULIR

HALAMAN 2

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

20

BLTHBLTH

PEMBUKUANPENCATATAN

PERHATIAN :

SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

BERI TANDA " X " DALAM

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA			
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B			JBB	

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN,
PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

2

0

s.d

BLTHBLTH

PEMBUKUAN

PENCATATAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
	JUMLAH BAGIAN A					JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke - dari halaman Lampiran-II

- HARTA PADA AKHIR TAHUN
- KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

2

0

BL

TH

s.d

BL

TH

PEMBUKUANPENCATATAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA " X " DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN		HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10 dst						
JUMLAH BAGIAN A				JBA		

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10 dst					
JUMLAH BAGIAN B				JBB	

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5 dst				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian		Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)		(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO			
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]</small>		
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]</small>		
	3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]</small>		
	4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]</small>		
	5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB <small>[Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]</small>		
	6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)		
	7	KOMPENSASI KERUGIAN <small>[Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]</small>		
	8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)		

No	Uraian		Nilai
(1)	(2)		(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]		
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	[K / I /]	
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]		
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
	1	5% x	
	2	15% x	
	3	25% x	
	4	30% x	
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] <small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small>		
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] <small>[Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]</small>		

....., 20....

SUAMI

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

ISTERI

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

**Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu**

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto Pedagang Pengecer	PPh Pasal 25 Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- dari halaman

**Daftar Jumlah Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Per Masa Pajak Serta Dari Masing-Masing Tempat Usaha**

Nama :
NPWP :
Alamat :

No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPh Final 1% Dibayar
Jumlah				

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini
--

Formulir Perubahan Data ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan, dengan dilengkapi dokumen yang menunjukkan bahwa data Wajib Pajak mengalami perubahan.

A. FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK. Isi atau beri tanda x pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)

Jenis Perubahan: ☐ Permohonan Wajib Pajak ☐ Perubahan Data Secara Jabatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Nama Wajib Pajak

Gelar Depan

 Gelar Belakang

B. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. Perubahan Kategori ☐ 1. Orang Pribadi
Wajib Pajak orang pribadi ☐ 2. Wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
☐ 3. Istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
☐ 4. Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)
☐ 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (WBT)

2. Perubahan Identitas Wajib Pajak
Nama Wajib Pajak

Gelar Depan

 Gelar Belakang

Tempat /Tanggal lahir (tgl-bln-thn)

 /

Status Perkawinan ☐ 1 Kawin ☐ 2 Tidak Kawin

Kebangsaan ☐ Indonesia NIK:

☐ Asing Negara Asal:

No. Paspor:

Nomor Telepon/Handphone

E-mail

3. Perubahan Sumber Penghasilan Utama

<input type="checkbox"/> Pekerjaan dalam hubungan kerja	<input type="checkbox"/> 1. PNS	<input type="checkbox"/> 2. TNI/POLRI	KLU <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table>
	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan	<input type="checkbox"/> 4. Pegawai Swasta	(diisi oleh petugas)
	<input type="checkbox"/> 5. Pegawai BUMN/BUMD	<input type="checkbox"/> 6. Pegawai Badan Publik	
	<input type="checkbox"/> 7. Pejabat Negara/Daerah	<input type="checkbox"/> 8. Pekerja pada pemberi kerja yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak	
	<input type="checkbox"/> 9. Pegawai Lainnya	Uraian <table border="1" style="display: inline-table; width: 200px; height: 20px;"></table>	KLU <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"></table>

☐ Kegiatan Usaha

 KLU

(diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

☐ Pekerjaan Bebas

 KLU

(diisi oleh petugas)

Merk Dagang/Usaha

Memiliki Karyawan ☐ Ya ☐ Tidak

Metode Pembukuan/Pencatatan ☐ Pembukuan ☐ Pencatatan

☐ Lainnya

 KLU

(diisi oleh petugas)

4. Perubahan Alamat

☐ Tempat Tinggal☐ Domisili KTP☐ Tempat Usaha

Alamat Baru:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Nomor Telepon

No. Faksimile

C PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN

C.1. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BADAN (kecuali Bendahara)

1. Perubahan Bentuk Badan

☐ 1. Perseroan Terbatas (PT)☐ 2. Perseroan Komanditer (CV)☐ 3. Perseroan lainnya☐ 4. BUMN/BUMD☐ 5. Firma (Fa)☐ 6. Kongsi☐ 7. Koperasi☐ 8. Dana Pensiun☐ 9. Persekutuan dan Perkumpulan☐ 10. Yayasan☐ 11. Organisasi massa☐ 12. Organisasi sosial politik☐ 13. Organisasi lainnya☐ 14. Lembaga dan bentuk badan lainnya☐ 15. Kontrak investasi kolektif☐ 16. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Perubahan Permodalan/Kepemilikan

☐ PMA☐ PMDN☐ Pemerintah☐ Lainnya

3. Perubahan Nama Wajib Pajak

4. Perubahan Alamat Tempat Kedudukan:

Jalan

Blok

Nomor

RT/RW

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Kode Pos

Propinsi

Telepon/Faksimile dan E-mail :

Nomor Telepon

No. Faksimile

E-mail

5. Dokumen Dasar Pendirian dan/atau perubahan terakhir:

Nomor Akte

Tempat/Tanggal Akte (tgl-bln-thn)

Nama Notaris

Nomor Akte Perubahan

6. Perubahan Tahun Buku

sd.

7. Perubahan Jenis Usaha / Kegiatan

(diisi oleh petugas)

8. Perubahan Merk Dagang/Usaha

9. Perubahan Pimpinan/Penanggung Jawab :

Nama																															
Jabatan																															
Kebangsaan	<input type="checkbox"/> Indonesia	NIK:																													
	<input type="checkbox"/> Asing	Negara Asal																													
	No. Paspor:																														
NPWP																															
Alamat domisili:																															
Jalan																															
Blok																															
Nomor	RT/RW /																														
Kelurahan/Desa																															
Kecamatan																															
Kota/Kabupaten																															
Propinsi																															
Kode Pos																															
Nomor Telepon																					No. Faksimile										
Nomor Handphone																															
E-mail																															

C.2. PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK BENDAHARA

10. Nama Resmi Jabatan Bendahara																															
11. Nama Satuan Kerja/Instansi																															
12. Nomor Surat Penunjukan																															
13. Alamat Satuan Kerja/Instansi:																															
Jalan																															
Blok																															
Nomor	RT/RW /																														
Kelurahan/Desa																															
Kecamatan																															
Kota/Kabupaten																															
Kode Pos																															
Propinsi																															
Nomor Telepon/Faksimile:																					No. Faksimile										

14. Nama pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara:

[illegible][illegible][illegible]

Jalan

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

RT/RW

--	--	--

 /

--	--	--

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

No. Faksimile

[illegible][illegible]

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas,

☐ Lengkap dan Benar

NIP.....

....., tanggal

Pemohon,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penggunaan
Norma Penghitungan
Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
.....
di
J a k a r t a

Memenuhi Ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agustus 1993 tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak yang dapat menggunakan Norma Penghitungan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000 tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghasilan Netto, dengan ini kami:

Nama :

Alamat :

NPWP :

Memberitahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun akan menggunakan Norma Penghitungan. Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk dalam Daftar Kode No :dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) :
.....

Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

(.....)

Lembar I Untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II Untuk : Wajib Pajak

KPP.PPh. 1.20.90.

Formulir ini disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan.

III. Contoh Format Lembar Penelitian SPT

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN			
NPWP:	Tanggal Terima:		
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa	<input type="checkbox"/> Ahli Waris
	<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Ket. Kematian	
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan	
	<input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP		
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
	<input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri SSP/BPN		
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1770 SS	<input type="checkbox"/> 1770 S	<input type="checkbox"/> 1770 (WP KPP Terdaftar)
Disampaikan oleh	<input type="checkbox"/> WP	<input type="checkbox"/> Kuasa	<input type="checkbox"/> Surat Penunjukan
Khusus e-SPT	<input type="checkbox"/> Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat di-load pada SIDJP		
	Jika SPT 1770SS, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto s.d. Rp. 60.000.000	Jika SPT 1770 S, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 S-I & 1770 S-II <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika bag. 5 diisi) <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Bag F 18b diisi)	Jika SPT 1770, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 - I s.d. 1770 - IV <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika bag. 5 diisi) <input type="checkbox"/> Neraca & Lap. Laba Rugi (Pembukuan) <input type="checkbox"/> Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto & Biaya (Norma) <input type="checkbox"/> Daftar Pembayaran PPh Ps.25 dari gerai (WP Pengusaha Tertentu) <input type="checkbox"/> Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 23 Tahun 2019 <input type="checkbox"/> Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atau Penghasilan LN <input type="checkbox"/> Daftar Nominatif Biaya Entertainment <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Bag F 18b diisi) <input type="checkbox"/> Penghitungan Kompensasi Kerugian <input type="checkbox"/> Penghitungan PPh Terutang (PH/MT)

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Dinyatakan: Lengkap/Tidak Lengkap** Dalam hal SPT Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin: 10px 0;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Petugas Peneliti,</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">*****</div>	SPT Dinyatakan: Diterima/Ditolak** dengan alasan*: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin: 10px 0;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Petugas Penerima,</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">*****</div>
---	--

**coret yang tidak perlu

*diisi dalam hal SPT tidak dapat diterima karena wajib elektronik/sedang dilakukan pemeriksaan/dll

✗